



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADJAR MAJARDI
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 245807

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **11.495.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/22 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **965.000.000**

1. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, MERCEDES C250 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON CHPT3 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **342.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	257.475.983
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.059.475.983
III. HUTANG	Rp.	433.072.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.626.403.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.